



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWA TENGAH – DI. YOGYAKARTA

LAPORAN IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWA TENGAH – DI.YOGYAKARTA

SEKRETARIAT PPID BBPJJN JAWA TENGAH – DI.YOGYAKARTA
Alamat: Jl. Soekarno – Hatta KM 26, Karangjati, Kabupaten Semarang, 50552
Email: ppid.bbpjnjatengdiy@pu.go.id
Telp (0298) 60233333, Fax (0298) 6023033

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia dan hidayah-Nya sehingga Laporan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Pelaksana PPID Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah – DI.Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 dapat tersusun dengan baik.

Pembuatan laporan ini merupakan wujud Kewajiban Badan Publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan ini berisi informasi tentang pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah – DI.Yogyakarta Tahun Anggaran 2022.

Dalam pelaksanaan kegiatan PPID Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah – DI.Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 tidak terlepas dari bantuan dan kerjasama berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak terkait baik di lingkungan PPK dan Satuan Kerja di Lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah – DI.Yogyakarta serta PPID Pelaksana Ditjen Bina Marga dan PPID Utama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang telah memberikan pembinaan kepada PPID Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah – DI.Yogyakarta.

Kami menyadari pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah – DI.Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 perlu ditingkatkan baik dari segi sarana prasarana maupun sistem pelayanan. Untuk itu kami mohon masukan dari semua pihak untuk pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik PPID di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah – DI.Yogyakarta ke depan.

Semarang, Januari 2023

PPID Pelaksana BBPJN JATENG-DIY

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan menerapkan nilai “Pelayanan” dari 10 (sepuluh) nilai – nilai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu Rasional, Kerjasama Tim, Inovasi, Efisiensi dan Efektivitas, Responsif, Kemitraan, Bekerja Keras, Bergerak Cepat, dan Bertindak Tepat, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menindaklanjutinya dengan beberapa aksi nyata demi terwujudnya pelayanan informasi kepada stakeholders. Implementasi undang-undang tersebut juga sebagai upaya dalam mewujudkan organisasi publik yang lebih transparan dan akuntabel, sebagai bagian dari upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean governance*).

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - D.I.Yogyakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR yang dibentuk pada tahun 2016 dan mulai efektif beroperasi di tahun 2017 dengan wilayah kerja penanganan jalan nasional Provinsi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - D.I.Yogyakarta sebelumnya dalam nomenklatur Kementerian PUPR adalah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Semarang. Nomenklatur yang baru tersebut ditetapkan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2020 tanggal 2 Juni 2020.

Dalam prosedur pelaksanaannya PPID Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - D.I.Yogyakarta mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik. Sedangkan dalam pemberian materi informasi kepada publik mengacu pada SK PPID No. 01/KPTS/PPID/2022 tentang Pemutakhiran Daftar Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan di Kementerian PUPR Tahun 2022 serta SK PPID No.02/KPTS/PPID/2022 tentang Pemutakhiran Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian PUPR.

Dalam melayani permohonan informasi kepada publik sesuai Kepmen tersebut menjadi suatu tantangan tersendiri karena pemahaman tentang materi yang boleh diberikan kepada publik karena cakupan dan kedalaman materi yang cukup luas di bidang kebinamargaan sehingga tim PPID BBPJN Jawa Tengah - D.I.Yogyakarta harus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait.

Untuk memberikan layanan yang baik dan berorientasi pada kepuasan pemohon informasi, maka PPID Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - D.I.Yogyakarta

berusaha untuk menyediakan layanan pemohon informasi dengan mengoptimalkan fasilitas yang ada.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud diterbitkannya Laporan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Pelaksana PPID Daerah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - D.I.Yogyakarta adalah dalam rangka memenuhi kewajiban Badan Publik, sesuai dengan Kepmen PUPR Nomor 987/KPTS/M/2022 Pelaksana PPID mempunyai salah satu tugas yaitu membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan diserahkan kepada PPID Utama.

Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk melaporkan kepada PPID Utama tentang upaya-upaya pelayanan dan pengelolaan informasi publik yang telah dilakukan untuk mengimplementasikan UU KIP di lingkungan PPID Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - D.I.Yogyakarta Tahun Anggaran 2022.

BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Kebijakan Internal Terkait Implementasi UU KIP

Keberadaan UU KIP sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; dan, (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU KIP adalah wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

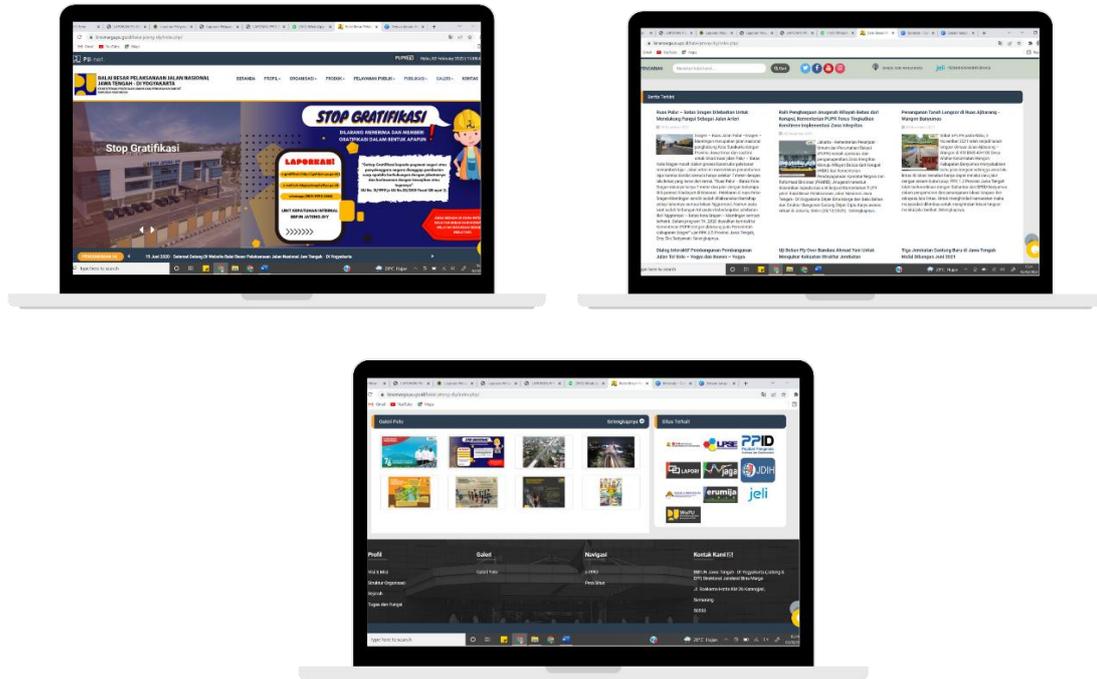
Untuk menindaklanjuti UU KIP dan Keputusan Menteri PUPR Nomor 987/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu dibentuk Pelaksana PPID melalui Surat Keputusan Kepala BBPJN Jawa Tengah – DI.Yogyakarta Nomor 09.1/KPTS/Bb7/2022 tentang Unit Pelayanan Informasi Publik Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah – DI. Yogyakarta.

PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi.

Semua layanan informasi publik (permohonan informasi dan pengaduan) di lingkungan BBPJN Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - D.I.Yogyakarta ini masuk melalui Sekretariat PPID BBPJN Jawa Tengah - D.I.Yogyakarta. Dalam pelaksanaan penyediaan informasi, PPID BBPJN Jawa Tengah - D.I.Yogyakarta berkoordinasi dengan 5 bagian / bidang, 9 Satuan Kerja dan 31 PPK di lingkungan BBPJN Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta.

Guna meningkatkan penanganan permohonan layanan informasi di lingkungan BBPJN Jawa Tengah - D.I.Yogyakarta, PPID berupaya menyusun strategi untuk mempermudah pemohon mendapatkan layanan informasi publik di tengah pandemi yang terjadi pada tahun 2022 dengan memanfaatkan media online yaitu dengan menginformasikan alur permohonan informasi publik, formulir permohonan informasi, survey kepuasan pelanggan, formulir pengaduan masyarakat melalui website Balai di www.binamarga.pu.go.id/balai-jateng-diy serta informasi alamat email ppid (ppid.bbpinjatengdiy@pu.go.id) sehingga pemohon dapat mengirimkan permohonan melalui email tanpa datang langsung ke gedung layanan publik. Untuk melakukan konsultasi petugas sekretariat PPID juga melayani dengan responsif melalui email maupun whatsapp.

Informasi yang harus dipublikasikan ditayangkan melalui website dan media sosial BBPJJN Jawa Tengah – DI. Yogyakarta. Sedangkan informasi-informasi yang sifatnya untuk publik namun dapat diberikan dengan prosedur Pelayanan Informasi Publik sebagian telah masuk dalam database Sekretariat PPID dengan memanfaatkan *cloud* (penyimpanan virtual) Balai.



Gambar 1. Beranda Website BBPJJN Jawa Tengah-DI.Yogyakarta

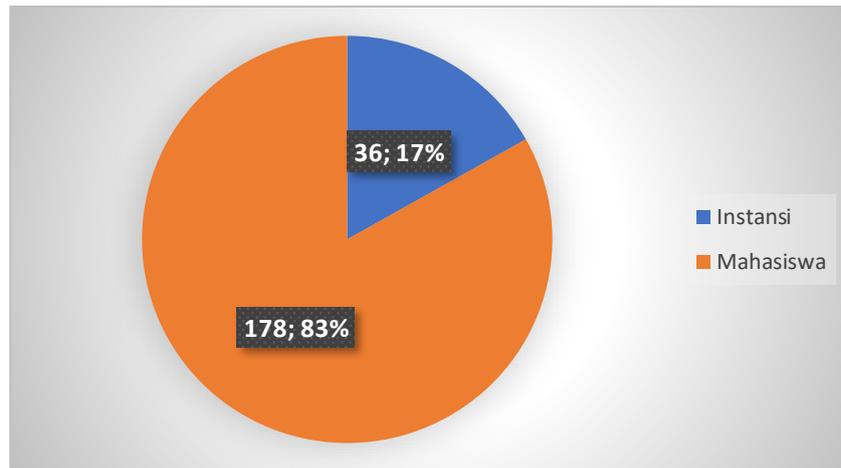
2.3 Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik

Pada Tahun 2022 PPID BBPJJN Jawa Tengah – DI.Yogyakarta melaksanakan pelayanan informasi publik secara offline melalui ruang layanan publik maupun online dengan memanfaatkan email. Seluruh permohonan informasi publik telah ditindaklanjuti dan telah selesai 100% dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah Pemohonan Informasi

Di tahun 2022 PPID BBPJJN Jawa Tengah – DI.Yogyakarta melayani sebanyak 214 permohonan informasi publik yang masuk langsung melalui ruang layanan maupun email.

- Presentase dan Pekerjaan Pemohon



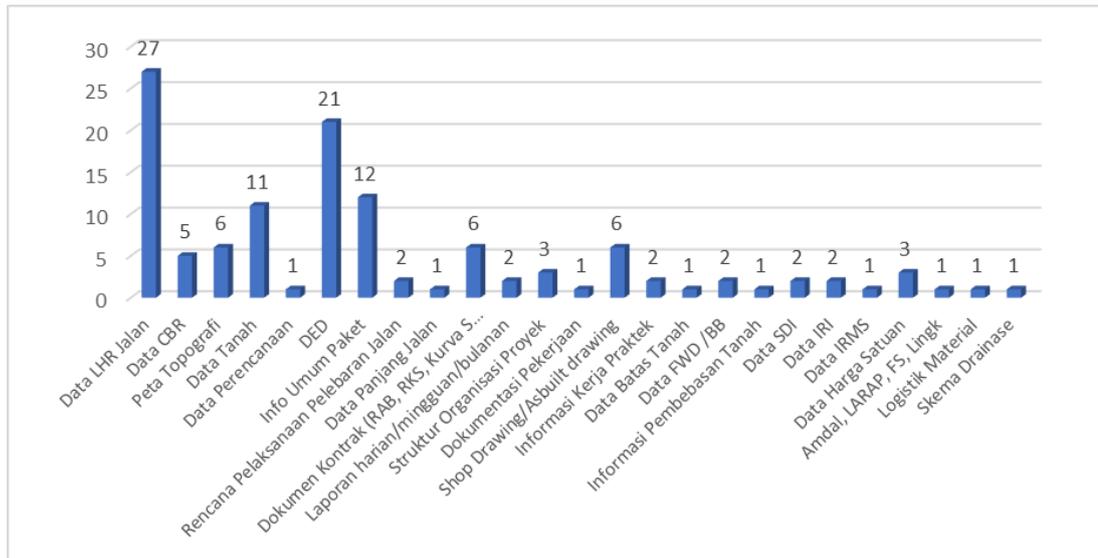
Bagan 2. Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Pekerjaan di Tahun 2022

Sebanyak 36 permohonan informasi di tahun 2022 berasal dari instansi pemerintahan yang bertujuan untuk menggunakan informasi tersebut yang berkaitan dengan program dari instansi tersebut. Dan sisanya sebanyak 178 permohonan berasal mahasiswa untuk keperluan perkuliahan maupun untuk bahan skripsi.

- Jumlah Permintaan Informasi

Jenis informasi yang diminta oleh pemohon di tahun 2022 sangat bervariasi yang jika disederhanakan dapat dikelompokkan dalam 25 jenis informasi, yaitu data LHR jalan, data CBR, Peta Topografi, Data Tanah, Data Perencanaan, DED, Informasi Umum Paket, Rencana Pelaksanaan Pelebaran Jalan, Data Panjang Jalan, Dokumen Kontrak (RAB, RKS, Kurva S, dan sebagainya), laporan harian/mingguan/bulanan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, struktur organisasi proyek, dokumentasi pekerjaan, shop drawing, informasi kerja praktik, data batas tanah, data FWD, informasi pembebasan lahan, Data SDI, Data IRI, Data IRMS, Data Harga Satuan, Amdal, Logistik Material dan Skema Drainase.

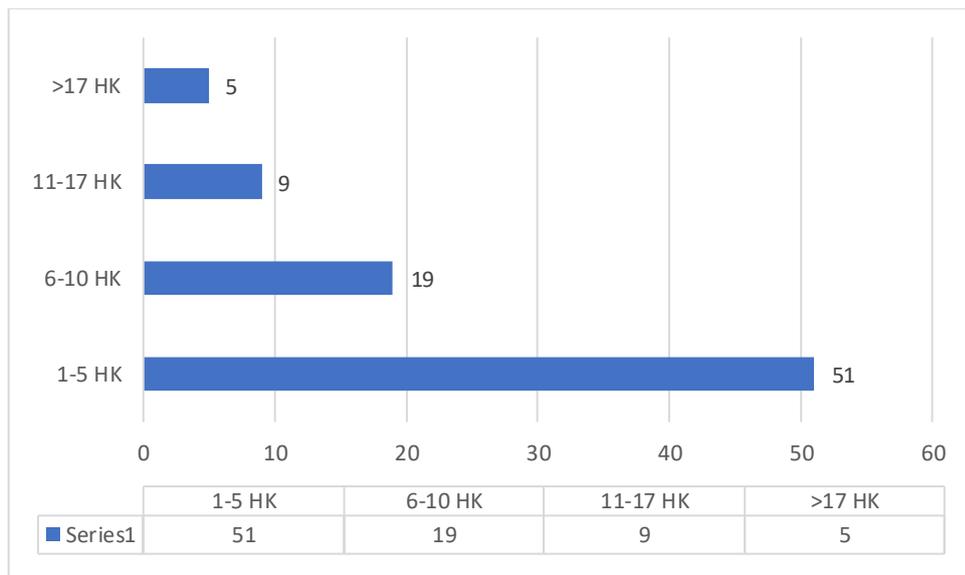
Jika ditotal maka jumlah informasi yang diminta ada sebanyak 214 informasi selama tahun 2022. Dari masing-masing informasi yang diminta terdapat variasi berupa lokasi ruas yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh jumlah informasi yang diminta oleh masing-masing pemohon jumlahnya bervariasi.



Bagan 3. Jenis Informasi Yang Diminta Oleh Pemohon Tahun 2022

Jumlah mencapai 33 jenis variasi data dengan total jumlah informasi yang diminta sebanyak 214 informasi. Setiap tahun sudah ada peningkatan pengetahuan publik tentang layanan informasi publik yang tersedia di BBPJJN Jawa Tengah – DI.Yogyakarta. Meski demikian jumlah informasi yang diminta oleh masing-masing pemohon banyak sedikitnya tidak dapat dikontrol oleh PPID karena jumlah tersebut berkaitan dengan kebutuhan dari masing-masing pemohon.

- Rata-rata Waktu Pelayanan



Bagan 4. Rata-Rata Waktu Pelayanan Tahun 2022

Di tahun 2022 dilihat dari rata-rata waktu layanan (hingga data diterima oleh pemohon) dapat terpenuhi dalam waktu 1-5 hari kerja dengan total 51 pemohon, dalam waktu 6-10 hari kerja dengan total 19 pemohon, dalam waktu 11-17 hari kerja dengan

total 9 pemohon dan sebanyak 5 pemohon terpenuhi dalam kurun waktu lebih dari 17 hari kerja.

Meski demikian dapat dijelaskan di tahun 2022 sebagian besar informasi yang diminta ada di Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan dengan keterbatasan jumlah personil dari Satker yang menangani informasi tersebut dan tingkat mobilitas dan kesibukan yang tinggi sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk mengumpulkan data tersebut. Walaupun membutuhkan waktu namun setiap permohonan informasi tetap ditindaklanjuti hingga tuntas.

Data-data yang pernah disampaikan kepada pemohon telah diinventaris oleh Sekretariat PPID untuk dimasukkan dalam database sehingga sedikit banyak membantu dalam proses pendistribusian data ke pemohon. Namun berjalannya waktu setiap data yang diminta oleh pemohon adalah data yang terupdate sehingga memerlukan koordinasi dengan satker pemilik data dan seringkali pemohon khususnya mahasiswa menginginkan data yang belum pernah digunakan oleh mahasiswa lainnya.

Sebagian besar permohonan data DED ditolak karena masih dalam jangka waktu pengecualian, sedangkan data LHR (data lalu lintas harian) yang dapat dipenuhi adalah yang berada di ruas jalan nasional. Data-data berupa dokumen kontrak tidak dapat diberikan karena masih dalam jangka waktu pengecualian. Adapun data tanah pada umumnya hanya ada di paket pembangunan jalan baru dan ruas jalan yang membutuhkan penanganan rekonstruksi.

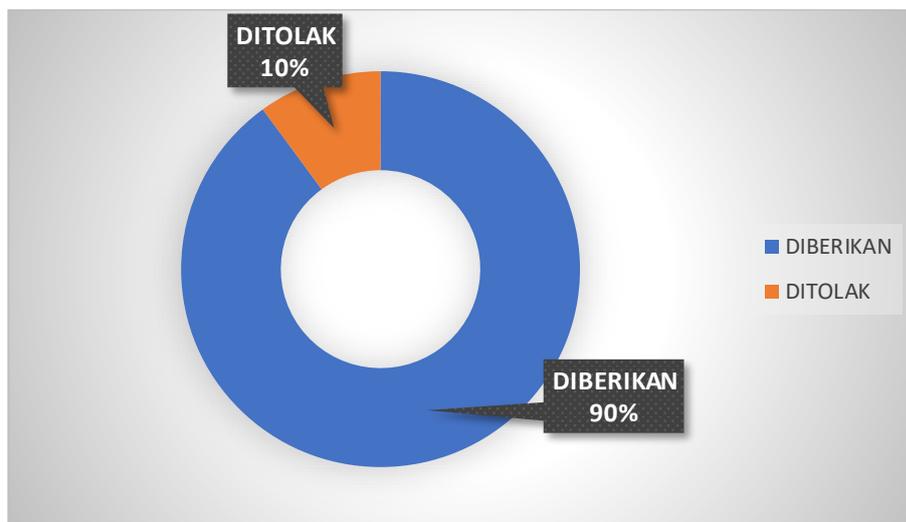
Informasi terbanyak yang diminta adalah data LHR masih terbanyak diminta oleh pemohon, lalu data DED, informasi umum paket pekerjaan, data perkerasan jalan, data CBR (*California Bearing Ratio*) atau data perbandingan beban penetrasi dari suatu lapisan tanah atau perkerasan terhadap beban standar. Data CBR ini masih berkorelasi dengan data tanah.

Namun dari tren informasi yang paling banyak diminta oleh pemohon menjadi catatan bagi PPID untuk memprediksi kebutuhan data yang sebaiknya disediakan di database. Salah satunya mengingat kebutuhan data LHR sangat tinggi maka PPID berkoordinasi dengan Bidang Keterpaduan Infrastruktur Jalan untuk mendapatkan data LHR tahunan yang telah diupdate secara berkala untuk dimasukkan dalam database PPID sehingga saat pemohon meminta informasi LHR di ruas tertentu maka sekretariat PPID sudah memiliki data tersebut di database dan bisa menyortir data sesuai kebutuhan yang diminta pemohon. Hal ini cukup berdampak pada waktu layanan.

Hal ini memerlukan kegiatan monitoring dan evaluasi PPID BBPJN Jawa Tengah-DI. Yogyakarta yang melibatkan Satker atau unit pemilik data untuk membahas tentang

pemutakhiran data di database PPID dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dari segi waktu layanan.

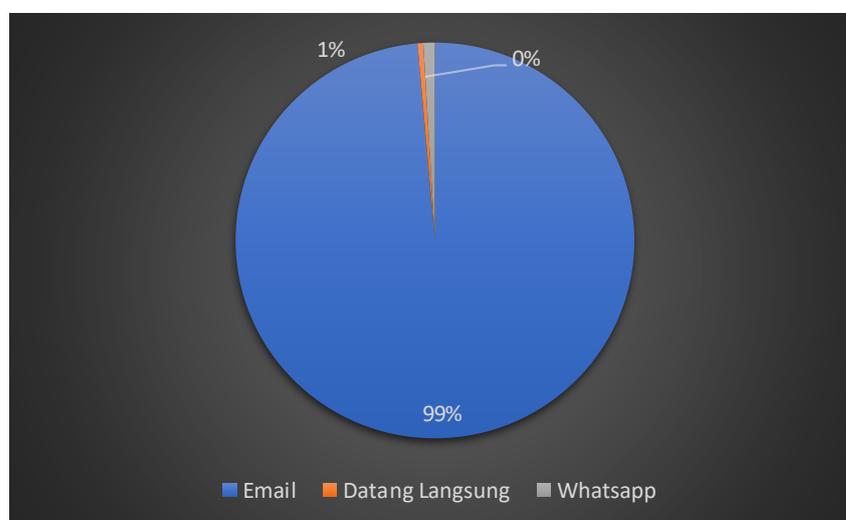
- Status Pelayanan Informasi



Bagan 5. Tindakanjuz PPID atas Permohonan Informasi Publik di BBPJN Jateng-DIY Tahun 2022

Dari keseluruhan permohonan informasi publik tahun 2022, sebanyak 170 permohonan informasi publik dikabulkan dan diberikan seluruh informasi yang diminta. Dan sebanyak 19 permohonan informasi publik ditolak karena seluruh informasi yang dimohonkan berupa informasi yang dikecualikan sesuai dengan Keputusan Menteri PU No. 451 Tahun 2017 dan SK PPID No. 2 Tahun 2022 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian PUPR. Seluruh permohonan informasi di tahun 2022 telah diproses dan diselesaikan.

- Media Permintaan Informasi



Bagan 9. Persentase Permohonan Berdasarkan Media Permintaan Informasi Tahun 2022

Di tahun 2022 terjadi para pemohon masih mengoptimalkan penggunaan email. Melalui penggunaan email dalam penyampaian permohonan oleh pemohon maupun pengiriman informasi dari Sekretariat PPID ke pemohon menjadi lebih mudah, lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Melalui media whatsapp 2 pemohon dan 1 pemohon memilih untuk datang langsung.

- Jumlah Sengketa Informasi

Pada tahun 2022 tidak terdapat sengketa informasi publik. PPID BBPJJN Jawa Tengah – DI.Yogyakarta berupaya agar pelaksanaan pelayanan informasi publik memenuhi standar prosedur yang berlaku di Kementerian PUPR.

2.4 Rekapitulasi Pengelolaan Informasi Publik

Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 674/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian PUPR menyebutkan bahwa setiap Tim Pelaksana PPID Pusat/Daerah memiliki tugas antara lain untuk menyediakan dukungan data dan informasi dengan mengacu pada daftar informasi yang wajib disediakan dan diumumkan diatur dalam Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Nomor: 01/KPTS/PPID/2022 sedangkan daftar informasi yang dikecualikan telah diatur dalam Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Nomor: 02/KPTS/PPID/2022.

Daftar informasi yang disediakan oleh BBPJJN Jawa Tengah – DI.Yogyakarta dapat diakses pada website: <https://binamarga.pu.go.id/balai-jateng-diy>

Tabel 1. Informasi Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

No	Perihal	Format Informasi Yang Tersedia	Dipublikasi (Sudah/Belum)	Keterangan
1	Profil Unit Kerja			
	Visi dan Misi	Hardcopy, softcopy	Sudah	https://binamarga.pu.go.id/balai-jateng-diy/index.php/konten/profil/visi-misi
	Tugas dan Fungsi	Hardcopy, softcopy	Sudah	https://binamarga.pu.go.id/balai-jateng-diy/index.php/konten/profil/tugas-dan-fungsi
2	Daftar Pejabat Struktural dan/atau fungsional	Hardcopy, softcopy	Sudah	https://binamarga.pu.go.id/balai-jateng-diy/index.php/konten/profil/struktur-organisasi
3	Informasi umum pengadaan barang dan jasa (e-procurement)	Softcopy	Sudah	https://binamarga.pu.go.id/balai-jateng-diy/index.php/ (bagian bawah kanan beranda, pada "Situs Terkait" LPSE)
4	Pengumuman pelelangan barang dan jasa	Softcopy	Sudah	https://binamarga.pu.go.id/balai-jateng-diy/index.php/ (bagian bawah kanan beranda, pada "Situs Terkait" LPSE)

No	Perihal	Format Informasi Yang Tersedia	Dipublikasi (Sudah/Belum)	Keterangan
5	Ringkasan laporan akses (pelayanan) informasi publik	Hardcopy, softcopy	Sudah	https://binamarga.pu.go.id/balai-jateng-diy/index.php/konten/pelayanan-publik/informasi-berkala
6	Informasi tentang agenda kegiatan yang telah, sedang dan akan berjalan	Hardcopy, softcopy	Sudah	https://binamarga.pu.go.id/balai-jateng-diy/
7	Publikasi dan dokumentasi kegiatan bidang PUPR (buletin, brosur, pemberitaan website)	Hardcopy, softcopy	Sudah	https://binamarga.pu.go.id/balai-jateng-diy/ Instagram @pupr_jalan_jatengdiy Twitter /FB: @puprjalanjtgdiy YOUTUBE: PUPR JALAN JATENG DIY brosur di ruang layanan
8	Program-program prioritas lingkup Kementerian PUPR	Hardcopy, softcopy	Sudah	https://binamarga.pu.go.id/balai-jateng-diy/ Instagram @pupr_jalan_jatengdiy Twitter /FB: @puprjalanjtgdiy YOUTUBE: PUPR JALAN JATENG DIY brosur di ruang layanan

Tabel 2. Informasi Wajib Tersedia Setiap Saat

No	Perihal	Format Informasi Yang Tersedia	Dipublikasi (Sudah/Belum)	Keterangan
1	Informasi statistik organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan	Hardcopy, softcopy	sudah	https://binamarga.pu.go.id/balai-jateng-diy/assets/js/vendor/ckeditor/uploads/Dokumen/STATISTIK%20ADMINISTRASI%20KEPEGAWAIAN_BBPJN_JATENGDIY_2020.pdf
2	Informasi tentang tata cara/ prosedur pelayanan public	Hardcopy, softcopy	Sudah	https://binamarga.pu.go.id/balai-jateng-diy/index.php/konten/pelayanan-publik/e-ppid
3	Produk hukum dalam lingkup tugas Kementerian PUPR	Hardcopy, softcopy	Sudah	https://binamarga.pu.go.id/balai-jateng-diy/index.php/konten/pelayanan-publik/informasi-berkala (link JDIH Kementerian PUPR)
4	Daftar dan dokumen surat perjanjian/ MoU selain perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa	Hardcopy, softcopy	Sudah	Arsip di Bagian Umum dan Tata Usaha (Sub Hukum)
5	Profil infrastruktur bidang PUPR	Hardcopy, softcopy	Sudah	https://binamarga.pu.go.id/balai-jateng-diy/index.php/konten/pelayanan-publik/informasi-publik (profil jalan nasional)
6	Laporan Barang Milik Negara	Hardcopy, softcopy	Sudah	Arsip di Bagian Umum dan Tata Usaha (Sub BMN)

No	Perihal	Format Informasi Yang Tersedia	Dipublikasi (Sudah/Belum)	Keterangan
7	Standar Operasional Prosedur kerja lingkup Kementerian PUPR	Hardcopy, softcopy	Sudah	https://binamarga.pu.go.id/balai-jateng-diy/index.php/konten/pelayanan-publik/e-ppid Arsip di Bagian terkait

Tabel 3. Informasi Wajib Diumumkan Serta Merta

No	Perihal	Format Informasi Yang Tersedia	Dipublikasi (Sudah/Belum)	Keterangan
1	Informasi tentang kerusakan infrastruktur PUPR akibat bencana alam	<i>Hardcopy</i>	Sudah	Melalui postingan media sosial Contoh: https://www.instagram.com/p/CV4_vGTvJb5/
2	Informasi tentang rencana gangguan fungsional terhadap utilitas publik	<i>Hardcopy, softcopy</i>	Sudah	Feed Instagram https://www.instagram.com/p/CXsWb5NvqQK/ (contoh informasi e-ppid dan website balai
3	Informasi progress tanggap darurat bencana	<i>softcopy</i>	Sudah	https://www.instagram.com/p/CHRrBWjnckD/
4	Laporan kejadian bencana	<i>soft copy</i>	Sudah	Melalui postingan media sosial

2.5 Kondisi Layanan Informasi Publik

Berikut merupakan kondisi layanan informasi publik di lingkungan BBPJJN Jateng-DIY yang diuraikan dalam 2 (dua) poin berikut:

1. Sumber Daya Manusia Pelayanan Informasi Publik

Keterbatasan jumlah personil sekretariat PPID BBPJJN Jawa Tengah-DI Yogyakarta yang juga merangkap sebagai petugas Komunikasi Publik sehingga pada waktu tertentu harus bertugas melakukan peliputan sehingga mengharuskan piket bergilir. Petugas di ruang layanan PPID BBPJJN Jawa Tengah-DI Yogyakarta telah dibekali dengan keikutsertaan pada kegiatan-kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis internal PPID di lingkungan Kementerian PUPR.

2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Loket Layanan Informasi Publik

Loket layanan informasi publik berada di Gedung Layanan Publik yang terletak di kawasan kantor BBPJJN BBPJJN Jawa Tengah-DI Yogyakarta di Jalan Soekarno – Hatta KM 26 Karangjati Kabupaten Semarang. Gedung ini difungsikan untuk layanan publik termasuk Pelayanan Informasi Publik. Loket pelayanan dibuka hari Senin - Jumat pada pukul 09.00 – 15.00 WIB.



Gambar 5. Ruang Layanan Publik

Pada ruang layanan telah dipublikasikan maklumat layanan, SOP dan persyaratan pelayanan yang ditampilkan di ruang layanan dalam bentuk banner maupun tayangan TV selain itu juga ditampilkan secara elektronik melalui tautan pada website Balai: <https://binamarga.pu.go.id/balai-jateng-diy/index.php/konten/pelayanan-publik/e-ppid>

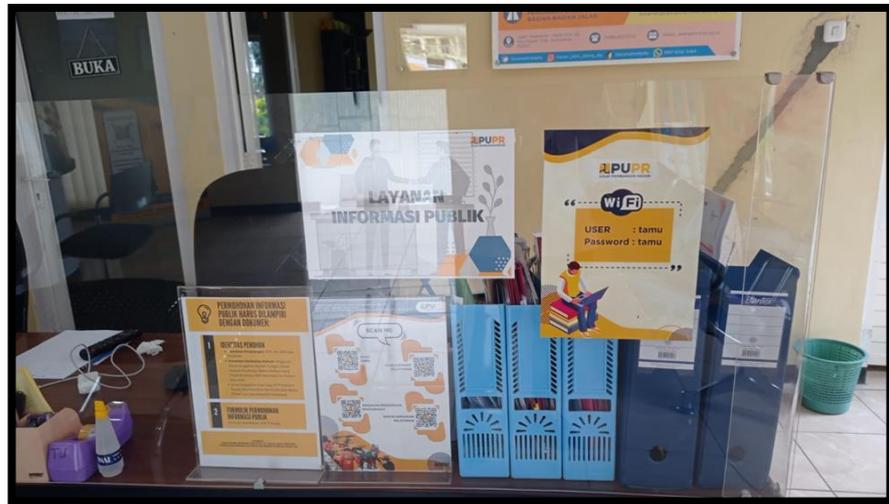


Gambar 6. Maklumat Layanan dan Publikasi Informasi Prosedur Layanan

Meja Layanan Informasi Publik dilengkapi dengan:

1. Meja dan kursi front desk sebanyak 2 buah
2. Formulir layanan
3. 2 unit laptop

4. 1 unit printer
5. 1 unit dispenser
6. 1 unit Air Conditioner
7. 1 unit TV Plasma
8. Koneksi Wi-Fi
9. Toilet



Gambar 7. Informasi Akses Wifi di Ruang Layanan

Setiap permohonan informasi publik dilayani melalui mekanisme layanan informasi publik melalui PPID BBPJN Jawa Tengah-DI Yogyakarta. Pemohon informasi publik dapat mengajukan permohonan melalui berbagai media tersedia dengan melampirkan formulir permohonan, bukti identitas diri perorangan / badan hukum.

Ruang layanan telah dilengkapi dengan kaca akrilik di meja layanan untuk pembatas antara pemohon yang datang langsung dengan petugas layanan sebagai upaya antisipasi penyebaran COVID-19. Selain itu juga dilengkapi dengan penyediaan hand sanitizer serta kursi tunggu dengan jumlah yang representatif sehingga pemohon layanan bisa duduk dengan jarak yang aman satu sama lain.

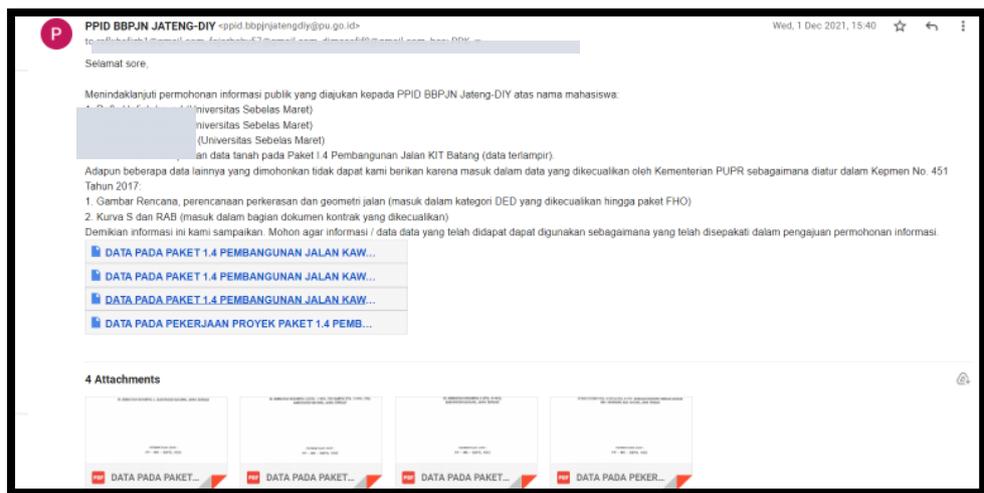
a. *Layanan Permohonan Informasi Publik*

Pemberian layanan dilakukan dengan pemohon secara *offline* hingga *online* melalui email, whatsapp, hingga media sosial. Tautan informasi layanan beserta alur dan formulir permohonan telah dipublikasikan di website Balai.

Untuk memudahkan pengguna layanan, PPID BBPJN Jawa Tengah - DI. Yogyakarta menyediakan scan barcode untuk pengisian buku tamu, untuk

mengunduh formulir atau mengetahui alur layanan, tautan untuk mengisi survey kepuasan masyarakat dan tautan untuk menyampaikan saran / pengaduan yang tersedia di dekat pintu masuk ruang layanan hingga di meja layanan.

Setelah diisi dan dilengkapi dengan identitas diri, pemohon dapat mengajukan permohonan melalui email PPID BBPJJN Jawa Tengah-DI Yogyakarta. Untuk mengetahui perkembangan permohonan yang dimasukkan, pemohon dapat memantaunya melalui layanan whatsapp center di nomor: 08112663464 dimana petugas sekretariat PPID BBPJJN Jawa Tengah-DI.Yogyakarta bertugas sebagai admin.



Gambar 8. Penggunaan Email Untuk Sarana Pelayanan Informasi Publik

b. *Pengelolaan Media Sosial Untuk Sarana Komunikasi dengan Masyarakat*



Gambar 9. Sosial Media BBPJJN Jateng-DIY

Media sosial merupakan sarana yang sangat efektif dalam penyebaran informasi di dunia yang semakin maju teknologinya dan masyarakat Indonesia banyak yang mengakses media sosial. Selain sebagai sarana untuk menyampaikan informasi mengenai perkembangan proyek infrastruktur di bidang kebinamargaan. Media sosial juga digunakan untuk menginformasikan kepada masyarakat rencana

gangguan utilitas seperti rekayasa lalu lintas akibat adanya proyek pembangunan, serta menginformasikan adanya kerusakan infrastruktur akibat bencana alam seperti longsor, banjir dsb.

Media sosial semakin mempermudah institusi dalam membangun sebuah keterikatan dengan masyarakat / *stakeholders* dengan komunikasi dua arah melalui fitur komentar. Komunikasi dua arah dengan masyarakat yang melaporkan informasi aduan tentang kerusakan jalan maupun kondisi terkait infrastruktur jalan dan jembatan. Di samping itu juga sebagai sarana tanya jawab seputar informasi umum. Tim Sekretariat PPID BBPJN Jawa Tengah-DI Yogyakarta yang juga merangkap sebagai admin media sosial merespon laporan - laporan aduan yang masuk melalui platform media sosial berdasarkan informasi yang bersumber dari tim pengelola dokumentasi yaitu PPK/Satker/Bidang terkait.

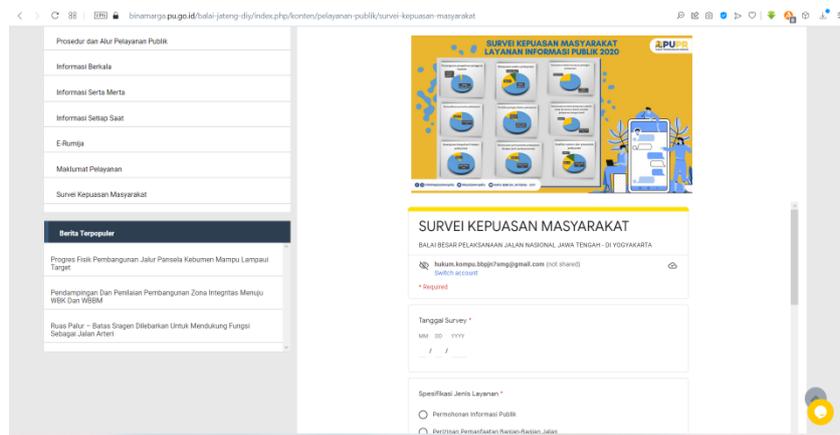
Meskipun demikian untuk masyarakat yang menyampaikan keinginan untuk memohon informasi berupa detail data-data yang tidak termasuk dalam informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sesuai Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Nomor: 01/KPTS/PPID/2022 maka PPID mengarahkan untuk menyampaikan permohonan melalui surat, email atau datang langsung ke kantor BBPJN Jawa Tengah – DI.Yogyakarta agar dapat diproses lebih lanjut permohonannya sesuai persyaratan dan peraturan yang berlaku.

2.6 Upaya Inovasi Pelayanan Informasi Publik

Website menjadi sarana terdepan layanan yang dapat dijangkau secara virtual. Berkaca pada kondisi pandemi COVID-19 maka kelengkapan informasi di website menjadi sangat penting agar masyarakat tetap dapat mengakses informasi meskipun tidak melalui tatap muka dengan petugas. Website BBPJN Jawa Tengah-DI Yogyakarta menggunakan domain dari Kementerian PUPR yaitu <https://binamarga.pu.go.id/balai-jateng-diy> BBPJN Jawa Tengah-DI Yogyakarta berupaya untuk melengkapi informasi-informasi yang diharuskan dipublikasi sesuai dengan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Nomor: 01/KPTS/PPID/2022 seperti formulir permohonan informasi publik maupun formulir pengaduan masyarakat serta informasi yang bersifat wajib, berkala dan serta merta.



Gambar 10. Publikasi Alur Pelayanan Informasi Publik dan Formulir Layanan Melalui Website



Gambar 11. Publikasi Hasil Survey Kepuasan dan Formulir Survey Kepuasan Masyarakat Melalui Website



Gambar 12. Scan Barcode Untuk Akses Layanan Publik Disediakan di Gedung Layanan

Pada tanggal 20 Desember 2022 BBPJN Jawa Tengah – DI. Yogyakarta mendapatkan apresiasi dan penghargaan predikat menuju Wilayah Bebas Korupsi tahun 2022 dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini menuntut agar pembenahan layanan publik yang salah satunya adalah layanan informasi publik terus digiatkan. Untuk memastikan layanan publik berjalan sesuai dengan prosedur dan tidak ada penyimpangan maka di gedung layanan publik terpampang informasi untuk akses pengguna layanan melaporkan tindakan penyimpangan atau ketidakpuasan dalam penerimaan layanan melalui banner-banner sebagai berikut.



Gambar 13. Sarana Informasi Kepada Pengguna Layanan Untuk Pengawasan Pelaksanaan Layanan Publik

2.7 Survey Layanan Informasi Publik

Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat PPID BBPJN Jawa Tengah – DI.Yogyakarta tahun 2022 dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja unit pelayanan publik secara berkala. Tujuannya untuk mengetahui kinerja unit pelayanan publik internal PPID pada tahun 2022 sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.

Unsur-unsur dalam kuesioner untuk mengetahui SKM meliputi 9 unsur pelayanan yaitu: persyaratan layanan, prosedur layanan, waktu pelayanan, biaya/tarif layanan, produk spesifikasi jenis layanan, kompetensi petugas layanan, perilaku petugas layanan, sarana dan prasarana layanan, penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Form Survey Kepuasan Masyarakat ini dibagikan kepada para pemohon informasi publik yang telah selesai mendapatkan layanan informasi melalui link (<https://binamarga.pu.go.id/balai-jateng-diy/index.php/konten/pelayanan-publik/survei-kepuasan-masyarakat>) yang dikirimkan petugas PPID BBPJN Jawa Tengah-DI Yogyakarta melalui whatsapp/email. Sebanyak 29 pemohon informasi publik yang memberikan feedback melalui pengisian Survey Kepuasan Masyarakat. Jumlah pemohon informasi yang memberikan feedback ini meningkat dibandingkan tahun 2021 sebanyak 21 orang.

Dari data survey yang dilaksanakan oleh PPID BBPJN Jawa Tengah-DI Yogyakarta tahun 2022 diperoleh informasi sejumlah 93,1% pemohon informasi atau sebanyak 27 orang berasal dari mahasiswa, sedangkan sisanya 6,9% sebanyak 2 orang berasal dari instansi pemerintah.

Dari jumlah tersebut diketahui 75,9% orang atau sejumlah 22 orang berpendidikan terakhir SMA/SLTA/Madrasah Aliyah, Sarjana (S1) sebanyak 10,3% atau sejumlah 3 orang, Diploma (D1/D2/D3) sebanyak 3,4% atau 1 orang dan Diploma 4 (D4) sebanyak 3,4% atau 1 orang.

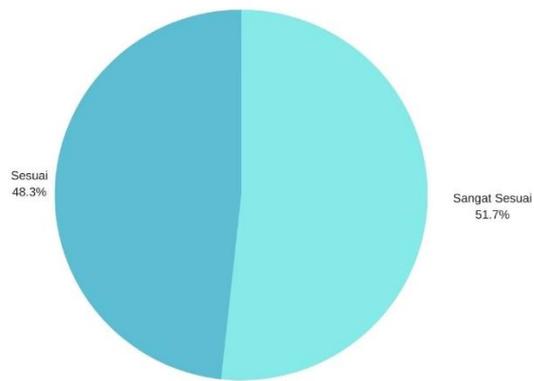
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Informasi Publik PPID BBPJN Jawa Tengah – DI.Yogyakarta sebagai berikut:

a. Kesesuaian Persyaratan Layanan

Pertanyaan yang disampaikan untuk mengukur faktor persyaratan administrasi layanan adalah “Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya?”. Dari bagan di bawah ini diketahui bahwa persyaratan administrasi dari pelayanan PPID BBPJN Jawa Tengah – DI.Yogyakarta sebanyak 51,7% responden menilai sangat sesuai dan sisanya menjawab sesuai.

Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya?

- SANGAT SESUAI
- SESUAI
- KURANG SESUAI
- TIDAK SESUAI



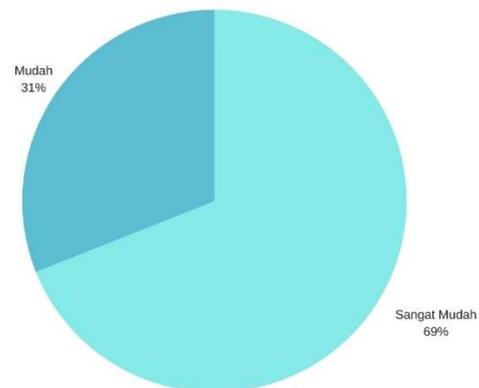
Bagan 13. Persentase Tingkat Kesesuaian Persyaratan Administrasi Layanan Tahun 2022

b. Kemudahan Prosedur Layanan

Pertanyaan prosedur adalah “Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini?”. Dari bagan di bawah ini diketahui bahwa penilaian untuk prosedur pelayanan informasi publik dengan hasil *mudah* sebanyak 31% dan sisanya sebanyak 69% menjawab *sangat mudah*. Prosedur layanan dapat diakses oleh pemohon melalui website Balai dan tayangan TV serta Banner di ruang layanan. Petugas sekretariat PPID juga melayani pertanyaan tentang prosedur layanan melalui Whatsapp Center, email dan tatap muka di ruang layanan.

Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini?

- SANGAT MUDAH
- MUDAH
- KURANG MUDAH
- TIDAK MUDAH



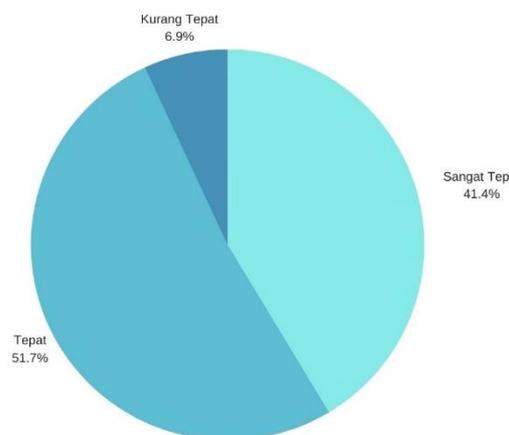
Bagan 14. Persentase Tingkat Kemudahan Prosedur Layanan Tahun 2022

c. Ketepatan Waktu Pelayanan

Pertanyaan untuk mengukur kesesuaian waktu layanan adalah “Bagaimana pendapat Saudara tentang ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan?”. Dari hasil pengisian survey diketahui sebanyak 41,4% responden menjawab *sangat tepat*, sebanyak 51,7% responden menilai *tepat* dan sisanya 6,9% responden menjawab *kurang tepat*.

Bagaimana pendapat Saudara tentang ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan?

- SANGAT TEPAT
- TEPAT
- KURANG TEPAT
- TIDAK TEPAT



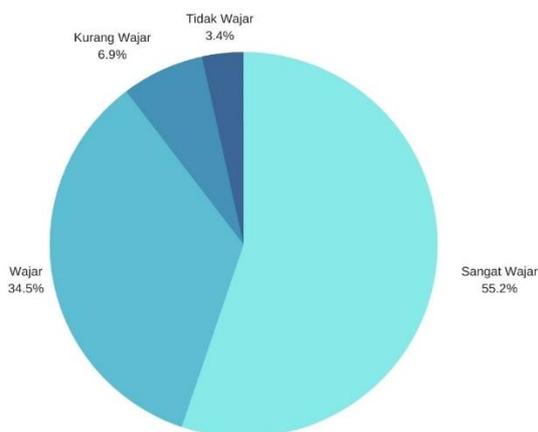
Bagan 15. Persentase Tingkat Ketepatan Waktu Layanan

d. Biaya/Tarif Layanan

Pertanyaan mengenai tarif layanan adalah “Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan?”. Dari bagan di bawah ini diketahui sebanyak 56,2% responden menilai *sangat wajar*, sebanyak 34,5% menilai *wajar*, sebanyak 6,9% menilai *kurang wajar* dan sisanya 3,4% menilai *tidak wajar*. Dalam hal ini petugas layanan tidak memungut biaya dalam pelayanan sesuai peraturan tentang penyelenggaraan layanan informasi publik.

Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan?

- SANGAT WAJAR
- WAJAR
- KURANG WAJAR
- TIDAK WAJAR



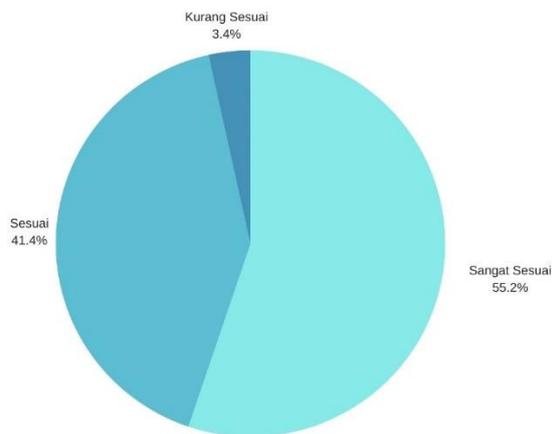
Bagan 16. Persentase Tingkat Kewajaran Biaya Layanan

e. Kesesuaian Hasil Layanan

Pertanyaan produk spesifikasi jenis layanan adalah “Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan?”. Dari jawaban responden didapatkan hasil sebanyak 56,2% menilai *sangat sesuai*, sebanyak 41,4% menilai *sesuai*, sedangkan 3,4% responden menjawab *sangat sesuai*.

Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan?

- SANGAT SESUAI
- SESUAI
- KURANG SESUAI
- TIDAK SESUAI



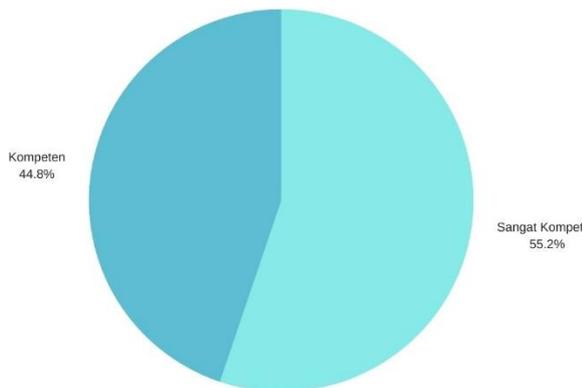
Bagan 17. Persentase Tingkat Kesesuaian Antara Produk dan Standar Layanan

f. Kompetensi Petugas Layanan

Pertanyaan mengenai kompetensi petugas adalah “Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan?”. Sebanyak 56,2% responden menilai kompeten, sisanya 44,8% menilai kompeten. Hal ini menjadi evaluasi bagi petugas sekretariat PPID BBPJN Jawa Tengah – DI.Yogyakarta untuk lebih meningkatkan kompetensi di bidang layanan informasi publik.

Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan?

- SANGAT KOMPETEN
- KOMPETEN
- KURANG KOMPETEN
- TIDAK KOMPETEN



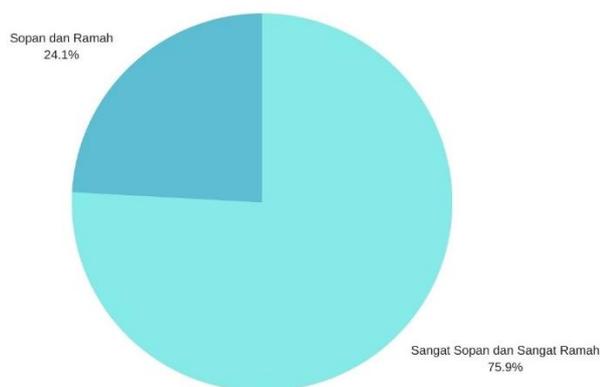
Bagan 18. Persentase Tingkat Kompetensi Petugas Layanan

g. Perilaku Petugas Layanan

Pertanyaan mengenai perilaku petugas adalah “Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan?”. Dari respon survey didapatkan penilaian dari 75,9% responden menyatakan *sangat sopan dan sangat ramah* sedangkan sisanya 24,1% responden menyatakan *sopan dan ramah*. Hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan oleh petugas agar dalam melayani pemohon tetap bersikap dengan lebih baik dan lebih responsif.

Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan?

- SANGAT SOPAN DAN SANGAT RAMAH
- SOPAN DAN RAMAH
- KURANG SOPAN DAN KURANG RAMAH
- TIDAK SOPAN DAN TIDAK RAMAH



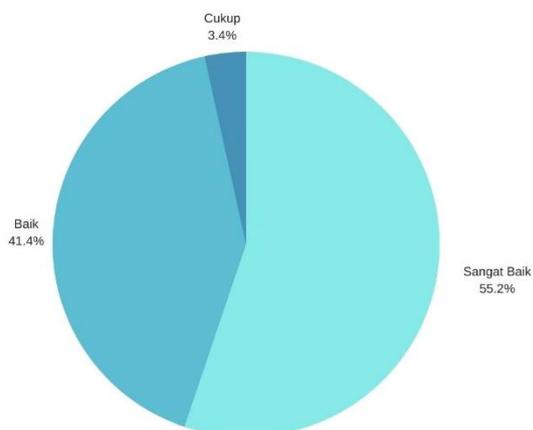
Bagan 19. Persentase Perilaku Petugas Layanan

h. Sarana dan Prasarana Layanan

Pertanyaan mengenai sarana dan prasarana layanan adalah “Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana pelayanan?”. Dari hasil survey didapatkan sebanyak 56,2% responden menjawab *sangat baik*, 41,4% responden menjawab *baik* dan sebanyak 3,4% responden menjawab *cukup*.

Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana pelayanan?

- SANGAT BAIK
- BAIK
- CUKUP
- BURUK



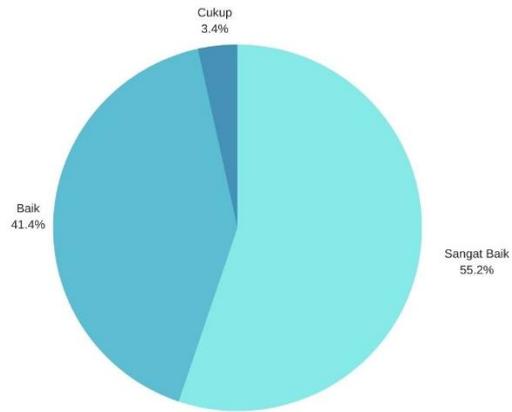
Bagan 20. Persentase Tingkat Kondisi Sarana Prasarana Layanan

i. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Pertanyaan penanganan pengaduan saran dan masukan adalah “Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan?”. Sebanyak 56,2% responden menjawab *telah dikelola dengan sangat baik*, sebanyak 41,4% responden menjawab *telah dikelola dengan baik* sedangkan sisanya 3,4% menjawab *dikelola dengan cukup baik*. Hal ini menjadi masukan kepada PPID BBPJJN Jawa Tengah – DI.Yogyakarta untuk lebih meningkatkan kualitas layanan pengaduan, saran dan masukan.

Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan?

- DIKELOLA DENGAN BAIK
- BERFUNGSI KURANG MAKSIMAL
- ADA TETAPI TIDAK BERFUNGSI
- TIDAK ADA



Bagan 21. Persentase Tingkat Penanganan Pengaduan

Dari saran dan masukan yang disampaikan oleh responden di tahun 2022 menyampaikan tentang proses layanan yang dirasakan masih cukup lama agar ditingkatkan kecepatannya karena informasi yang diminta sangat dibutuhkan untuk penelitian. Hal ini membutuhkan koordinasi yang lebih baik dengan unit pemilik data serta membuat database bersama menggunakan penyimpanan cloud.

Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat untuk layanan public di BBPJJN Jawa Tengah – DI.Yogyakarta tahun 2022 salah satunya pada Layanan Informasi Publik juga telah dilakukan oleh Kementerian PAN-RB sebagai bagian penilaian atas unit kerja yang diusulkan sebagai menuju wilayah Zona Integritas Tujuannya untuk mengetahui kinerja unit pelayanan publik internal pada tahun 2022.